

KUNJUNGAN MENTERI PERDAGANGAN DAN BUMN DI SUMUT

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (tengah) didampingi Menteri BUMN Erick Thohir (kiri) menyampaikan pidato di hadapan peserta pameran UMKM di Kota Binjai, Sumatera Utara, Selasa (17/1). Kunjungan tersebut dalam rangka memantau pertumbuhan ekonomi di sektor UMKM.



FOTO: ANTARA

Kemen-PUPR Alokasikan Rp6,98 Triliun untuk Bidang Perumahan pada 2023

Pembangunan 3.362 unit rumah khusus dengan anggaran sebesar Rp890 miliar, termasuk pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN Nusantara yang bersifat tahun jamak (multiyears contract atau MYC) 2022 - 2024.

JAKARTA (IM) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran untuk bidang perumahan pada tahun ini sebesar Rp6,98 triliun.

“Untuk bidang perumahan dialokasikan sebesar

Rp6,98 triliun,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (17/1).

Dikutip dari *Antara*, Basuki menyampaikan, anggaran tersebut sudah termasuk dukungan bagi pembangunan

Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebesar Rp540 miliar.

Adapun anggaran bidang perumahan sebesar Rp6,98 triliun tersebut dialokasikan untuk pembangunan rumah susun sebanyak 5.379 unit dengan anggaran sebesar Rp2 triliun.

Kemudian pembangunan 145 ribu unit rumah swadaya dengan anggaran sebesar Rp3,19 triliun.

Pembangunan 3.362 unit rumah khusus dengan anggaran sebesar Rp890 miliar, termasuk pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN Nusantara yang bersifat tahun jamak (multiyears contract atau MYC) 2022 - 2024.

Kemudian Rp380 miliar untuk pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) bagi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah

(MBR) yang tersebar di 34 Provinsi, 3 Lokasi PSU Jalan Akses Perumahan, dan 100 Unit Rumah Inti Tumbuh Modular Tahun Gempa.

Sedangkan untuk dukungan teknis lainnya dialokasikan sebesar Rp210 miliar dan dukungan manajemen Rp300 miliar.

Kementerian PUPR pada tahun 2022 telah membangun 3.998 unit rumah susun. Kemudian Kementerian PUPR juga telah membangun 4.039 unit rumah khusus, 186.172 unit rumah swadaya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Lalu membangun 20.757 unit prasarana sarana dan utilitas (PSU) bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perumahan Ke-

menterian PUPR Iwan Suprijanto menyatakan pembangunan setidaknya 36 unit rumah jabatan menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (KIPP IKN) sudah siap untuk dimulai.

Ia mengemukakan bahwa setidaknya sekitar 36 unit rumah jabatan Menteri akan dibangun Kementerian PUPR di lokasi persil 104 dan 105 KIPP IKN.

Iwan menerangkan, pihaknya akan berusaha agar proses pembangunan dapat terlaksana dengan baik di lapangan, serta juga mengawal jadwal pekerjaan sesuai perencanaan yang telah ditentukan serta menjamin hasil pekerjaan berkualitas. ● **hen**

HALO Bidik Rp180 Miliar dari IPO

JAKARTA (IM) - PT Haloni Jane (HALO) menggelar penawaran umum perdana (IPO) dengan melepas 1,2 miliar saham baru. Calon emiten sektor kesehatan ini mengincar dana segar sebanyak-banyaknya Rp120 miliar hingga Rp180 miliar.

Pihak manajemen HALO mengatakan, perseroan akan memakai sekitar 100% dari seluruh dana IPO untuk modal kerja memenuhi kebutuhan operasional. “Perseroan akan melakukan pembelian bahan baku seperti Latex (karet alami), Filler, Sulphur, Antioxidant dan bahan penunjang produksi antara lain Inner Box, Master Box, Paper Pouch, dan batu bara,” demikian pernyataan manajemen PT Haloni Jane dalam prospektus, Selasa (17/1).

Dana IPO juga akan digunakan untuk membayar gaji karyawan pabrik dan karyawan kantor, pembelian bahan bakar / energi, pemeliharaan (mesin pabrik), hingga

perbaikan dan pembelian spare part (suku cadang) mesin di pabrik.

Perseroan akan mengeluarkan ongkos untuk pemeliharaan dan perbaikan kendaraan operasional pabrik, biaya transportasi dan pengiriman, dan sejumlah kebutuhan operasional lainnya. Bersama dengan penerbitan saham baru melalui IPO, HALO juga akan menerbitkan sebanyak 1,2 miliar Waran Seri I. Manajemen memaparkan dana dari waran juga akan masuk ke dalam pos modal kerja.

“Perseroan berkomitmen terkait realisasi penggunaan dana, tidak akan membuat perjanjian perjanjian yang mengandung benturan kepentingan. Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana ini belum dipergunakan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid,” tambah pernyataan manajemen. ● **dro**

Sektor Kelautan dan Perikanan Sumbang Rp1,87 T ke Negara

JAKARTA (IM) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkap realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kelautan dan perikanan tembus Rp1,87 triliun. Capaian ini merupakan yang tertinggi sejak 2014 lalu.

“Realisasi PNBP KKP sebesar Rp1,87 triliun. Ini pencapaian tertinggi selama ini dari tahun 2014,” kata Trenggono, dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Selasa (17/1).

Dalam paparannya, PNBP tahun ini melesat dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp995,74 miliar. PNBP pada 2021 itu juga lebih tinggi dari tahun 2020 yakni sebesar Rp857,30 miliar.

PNBP sektor kelautan dan perikanan tahun 2022 ini terdiri dari pajak sumber daya perikanan sebesar Rp1,1 triliun. Kemudian PNBP sumber daya alam Rp629 miliar dan PNBP BLU sebesar Rp48,99 miliar.

Dalam kesempatan itu juga disampaikan capaian rata-rata nilai tukar pelaku usaha telah meningkat, yakni

sebesar 106,46 untuk Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan 104,4 untuk Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI).

Nilai ekspor produk perikanan mencapai US\$5,71 miliar atau setara Rp84,60 triliun. Angka itu atau meningkat 10,66% dibandingkan periode yang sama tahun 2021.

Trenggono juga menyebutkan, untuk tahun 2023, pihaknya menargetkan ekspor hasil perikanan Indonesia bisa mencapai US\$7,66 miliar atau setara Rp116,1 triliun (kurs Rp 15.160). “Ekspor hasil perikanan bisa mencapai US\$7,66 miliar,” kata Trenggono.

Dalam paparannya, indikator kinerja utama KKP 2023 selain itu adalah, target Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan mencapai 5% sampai 6%. Lalu target produksi perikanan Indonesia mencapai 30,58 juta ton per tahun. “Angka konsumsi ikan 61,02 kg/kapita, nilai tukar nelayan mencapai 107-108, produksi garam 1,5 juta ton, luas kawasan konservasi menjadi 229,1 juta hektare,” ujarnya. ● **hen**

Transaksi Agen BRILink Tembus Rp1.400 Triliun dalam Setahun

JAKARTA (IM) - Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Sunarso menyebut nilai transaksi nasabah melalui Agen BRILink di seluruh Indonesia untuk mencapai lebih dari Rp1.400 triliun dalam satu tahun.

“Transaksi digital memang cenderung naik, tapi transaksi melalui agen BRILink setahun lebih dari Rp1.400 triliun. Itu fakta dan realitas,” kata Sunarso dalam webinar “Tren Perbankan di Tahun 2023” di Jakarta, Selasa (17/1).

Dilansir dari *Antara*, BRI akan terus menerapkan konsep hybrid banking dalam proses bisnisnya, sebagaimana tampak dari kegiatan operasional BRILink yang hadir secara konvensional, tapi proses bisnisnya berjalan secara digital.

Ia mengatakan, BRI tidak bisa mendigitalisasi layanan perbankan secara keseluruhan karena beber-

apa nasabah yang berusia tua cenderung tidak bisa mengakses layanan secara digital.

Melalui hybrid bank, BRI mendigitalisasi layanan inti terutama untuk nasabah di kota yang berusia muda, sehingga BRI tidak tertinggal tren penggunaan layanan perbankan digital, tapi BRI juga mempertahankan layanan perbankan konvensional.

Agen BRILink yang mampu hadir di kehidupan sehari-hari nasabah di pedesaan pun dipilih oleh nasabah BRI, terutama nasabah pemilik usaha ultra mikro dan mikro di pedesaan, yang dibidik menjadi sumber pertumbuhan baru BRI setelah terciptanya holding Ultra Mikro (UMi).

Layanan perbankan secara hybrid diterapkan BRI setelah mengadakan survei yang menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah BRI sudah familiar dengan

platform digital, meskipun penetrasi ponsel kecil, literasi keuangan masih rendah, dan pengetahuan terhadap produk keuangan di luar produk tabungan perbankan juga minim.

“Mereka juga sebetulnya terbuka pada produk keuangan di luar produk perbankan. Misalnya produk asuransi, mereka sudah bisa masuk ke nasabah BRI di pedesaan,” katanya.

Pembayaran secara tunai dengan uang kertas atau logam juga masih dominan menjadi pilihan nasabah.

“Kemudian nasabah BRI juga masih membutuhkan institusi yang melekat di masyarakat setempat, karena mayoritas pelaku usaha mikro dan mikro di desa mereka tidak punya aliran uang yang stabil sehingga kadang nasabah lebih memilih mendapatkan layanan dari agen,” katanya. ● **dot**

FOTO: ANTARA



TARGET PENYALURAN FLPP 2023

Pekerja menyelesaikan pembangunan perumahan di Margadadi, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (17/1). Pada tahun 2023 pemerintah menargetkan bisa menyalurkan 220.000 unit rumah subsidi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah senilai Rp25,18 triliun.



Kalbe Farma Investasi Rp155 Miliar ke Progen

JAKARTA (IM) - PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) menyiapkan strategi pertumbuhan setelah melakukan investasi senilai USD10 juta atau setara Rp155,96 miliar ke perusahaan litbang biologi asal Korea Selatan, Progen Co. Ltd.

Corporate Secretary KLBF Lukito Kurniawan Gozali mengatakan, investasi ini merupakan langkah perseroan untuk memperkuat portofolio produk pada segmen obat biologis.

“Investasi dibiayai menggunakan kas internal dan dana pinjaman,” kata Lukito, dilansir dari *Antara*, Selasa (17/1).

Lukito menerangkan, KLBF sedang berupaya untuk mengembangkan lini penelitian dan pengembangan (R&D), termasuk ekspansi produk obat resep berbasis biotech.

“Progen sebagai perusahaan R&D regional

melakukan riset untuk pengembangan obat-obatan biologis antara lain untuk terapi kanker,” terangnya.

Diungkapkan Lukito, investasi perseroan bukan merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020. Investasi ini diharapkan dapat memberikan benefit material perseroan di masa depan.

“Kontribusi pendapatan dan laba akan direalisasikan di masa mendatang setelah diperolehnya persetujuan regulator dan komersialisasi,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, transaksi investasi KLBF terdiri dari pembelian saham senilai USD3 juta atau setara 8,7%, serta pembelian convertible bonds (CB) yang diterbitkan Progen senilai USD7 juta dalam jangka waktu 5 tahun dan YTM 5%. ● **pan**

Kenaikan Subsidi Energi Jaga Angka Kemiskinan

JAKARTA (IM) - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, kenaikan angka kemiskinan erat kaitannya dengan kenaikan inflasi. Dalam hal ini, perekonomian Indonesia tahun 2022 dihadapkan pada tekanan inflasi yang bersumber dari peningkatan harga komoditas global, khususnya energi dan pangan, akibat perang di Ukraina, menyebabkan angka tingkat kemiskinan naik tipis namun tetap berhasil ditahan.

Jika dibandingkan dengan banyak negara lainnya, seperti di USA dan negara-negara di Eropa yang mencatatkan rekor tertinggi dalam empat dekade terakhir, kenaikan inflasi di Indonesia jauh lebih moderat. Hal ini terutama karena peran krusial APBN sebagai peredam gejolak (shock absorber) inflasi global melalui mekanisme subsidi energi dan alokasi belanja stabilisasi harga pangan.

Tingkat kemiskinan September 2022 tercatat sebesar 9,57% atau sebanyak 26,36 juta orang berada di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan ini naik tipis dari Maret 2022 (9,54%) tetapi lebih rendah dibanding tingkat kemiskinan pada September 2021 (9,71%). Ambang batas garis kemiskinan pada September 2022 meningkat sebesar 5,95% menjadi Rp535.547 dari sebelumnya Rp505.468 pada Maret 2022.

Secara spasial, tingkat kemiskinan per September 2022 naik tipis baik di perkotaan maupun di pedesaan. Tingkat kemiskinan di perkotaan naik menjadi sebesar 7,53% (Maret 2022: 7,5%). Persentase penduduk miskin di pedesaan juga mengalami kenaikan menjadi 12,36% (Maret 2022: 12,29%).

“Kenaikan tipis angka kemiskinan pada September 2022 terkait erat dengan kenaikan inflasi bahan pangan, pada periode Juni, Juli, Agus-

September, yang sempat mencapai puncaknya di 11,5% pada bulan Juli 2022. Keputusan Pemerintah untuk menaikkan subsidi energi menjadi Rp551 triliun menjadi faktor utama menjaga angka kemiskinan. Selain juga gerak cepat menurunkan inflasi pangan,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu dikutip dari laman Kemkeu, Selasa (17/1).

Sementara itu, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia (Rasio Gini) pada September 2022 tercatat sebesar 0,381, menurun 0,003 poin dari Maret 2022 (0,384). Penurunan Rasio Gini dipengaruhi oleh penurunan ketimpangan di perkotaan dan pedesaan, yang masing-masing menurun tipis 0,001 dari posisi Maret 2022.

“Upaya Pemerintah untuk mendorong inklusivitas pertumbuhan ekonomi terlihat dari penurunan ketimpangan baik di perkotaan maupun pedesaan. Bahkan, ketimpangan di pedesaan juga terus menunjukkan perbaikan dibandingkan level pra pandemi,” lanjut Febrio.

Dengan inflasi bahan pangan (*volatile food*) yang menunjukkan tren penurunan signifikan dari September 2021 (9,0%, yoy) hingga Desember 2022 (5,6%, yoy), ke depan tingkat kemiskinan juga diperkirakan dapat kembali menurun. Hal ini didukung pula dengan perbaikan kondisi ketenagakerjaan, di mana Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2022 meningkat mencapai 68,63%, hal ini akan mendorong perbaikan pendapatan masyarakat.

“Ke depan, Pemerintah perlu menjaga momentum penurunan inflasi dan akselerasi realisasi belanja pada Triwulan 1 2023 untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan,” pungkas Febrio. ● **dro**